

Cerpen-cerpen Lekra (1950—1965) sebagai strategi perjuangan politik PKI

Lekra's short stories (1950—1965) as a strategy for the political struggle of the PKI

Ahmad Syafa'at Junaidi^{1,*}, Sunu Wasono², & Bastian Zulyeno³

^{1,2,3}Universitas Indonesia

Pondok Cina, Beji, Depok, Indonesia

^{1,*}Email: ahmadsyafaatjunaidi@gmail.com; Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0005-1356-5523>

²Email: sunuwasono21@gmail.com; Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0008-8959-2829>

³Email: baszeno@gmail.com; Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-4992-3386>

Article History

Received 28 August 2023

Revised 15 October 2023

Accepted 22 October 2023

Published 2 November 2023

Keywords

literature; Lekra; PKI; *Harian Rakjat*.

Kata Kunci

sastra; Lekra; PKI; *Harian Rakjat*.

Read online

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.



Abstract

This study aims to reveal the contents and objectives contained in Lekra's short stories, which were published in *Harian Rakjat* in 1950–1965. The data source for this research is in the form of short stories: *Paman* by L.S. Retno, *Gambar Pemimpin* by Saibun, *Kebangunan di Kota Bengawan* by Namikakanda, and *Loper* by Putu Oka. This research is qualitative, using library research methods. The results of the study show that these short stories are loaded with political interests of the PKI as part of the PKI's struggle to influence the masses so that the PKI succeeds in the political competition in Indonesia in 1950–1965. In addition, these short stories show that there is a close relationship between literature (Lekra), politics (PKI), and the media (*Harian Rakjat*). From this relationship, literature and the media at that time were under political control. Lekra as a cultural institution in Indonesia became a political tool for the PKI to influence the ideology of readers and its supporters, and the *Harian Rakjat* was used by the PKI as a medium for spreading it. Basically, both Lekra and *Harian Rakjat* were tools for realising PKI politics, and both were in positions facilitated by the PKI.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menyingkap muatan dan tujuan yang terkandung dalam cerpen-cerpen Lekra yang dimuat di *Harian Rakjat* tahun 1950—1965. Sumber data penelitian adalah cerpen *Paman* karya L.S. Retno, *Gambar Pemimpin* karya Saibun, *Kebangunan di Kota Bengawan* karya Namikakanda dan *Loper* karya Putu Oka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerpen-cerpen tersebut sarat dengan muatan-muatan kepentingan politik PKI sebagai bagian dari strategi perjuangan PKI untuk memengaruhi massa agar dapat memenangkan PKI dalam kontestasi politik di Indonesia pada tahun 1950—1965. Selain itu, cerpen-cerpen tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara sastra (Lekra), politik (PKI) dan media (*Harian Rakjat*). Dari hubungan tersebut, sastra dan media pada masa itu berada di bawah kendali politik. Lekra sebagai salah satu lembaga kebudayaan di Indonesia menjadi alat politik PKI untuk memengaruhi ideologi pembaca sebagai pendukungnya, dan *Harian Rakjat* digunakan oleh PKI sebagai media penyebarannya. Pada dasarnya baik Lekra maupun *Harian Rakjat* merupakan alat untuk merealisasikan politik PKI dan keduanya dalam posisi terfasilitasi oleh PKI.

Copyright © 2023, Ahmad Syafa'at Junaidi, Sunu Wasono, & Bastian Zulyeno

How to cite this article with APA style 7th ed.

Junaidi, A. S., Wasono, S., & Zulyeno, B. (2023). Cerpen-cerpen Lekra (1950—1965) sebagai strategi perjuangan politik PKI. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(4), 1055—1070. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i4.789>



A. Pendahuluan

Indonesia pasca merdeka mengalami gejolak politik pada tahun 1950-an dalam menentukan arah sistem pemerintahannya. Pada tahun tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, yang di dalamnya terdiri dari kabinet-kabinet yang disusun berdasarkan pertimbangan kekuatan partai, sehingga konflik antar partai politik kerap terjadi dan mengakibatkan sering terjadinya perubahan kabinet. Pada masa demokrasi liberal di Indonesia, kekuatan partai menjadi hal yang dinomorsatukan. Para politisi sipil membentuk banyak partai politik, akan tetapi hanya beberapa partai saja yang benar-benar memiliki kekuatan di dalam kekuasaan. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) memperoleh 49 kursi (21%), Partai Nasional Indonesia (PNI) 36 kursi (16%), Partai Sosialis Indonesia (PSI) 17 kursi (7,3%), Partai Komunis Indonesia (PKI) 13 kursi (5,6%), Partai Katholik 9 kursi (3,9%), Partai Kristen 5 kursi (2,2%), dan Murba 4 kursi (1,7%) (Ricklefs, 2001).

Ketika akan diselenggarakannya pemilu pertama pada tahun 1955, kontestasi politik semakin memanas, partai politik atau organisasi masyarakat saling bersaing dalam memengaruhi dan mengorganisir massa untuk menjadi partai yang besar. Salah satu alat politik yang efektif dalam memengaruhi dan mengorganisir massa pada masa itu adalah lembaga kebudayaan, sehingga tidak mengherankan apabila di balik lembaga-lembaga kebudayaan terdapat kepentingan partai politik atau organisasi masyarakat. Foulcher (2012) mencatat bahwa pada periode (1950—1960an), konfrontasi terkait budaya Indonesia digunakan sebagai strategi untuk menanggapi situasi politik nasional dan internasional yang ada. Misalnya, Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) menjadi alat politik PNI, Lembaga Seni Budaya Indonesia (Lesbi) menjadi alat Partai Indonesia (Partindo), Lembaga Budaya Muslim Indonesia (Lesbumi) menjadi alat Nahdhatul Ulama (NU), Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam (Leksi) menjadi alat Partai Tarbiyah Islamiyah (Perti), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) menjadi alat Masyumi, Lembaga Kebudayaan Seni Muslim Indonesia (Laksmi) menjadi alat Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) menjadi alat PKI (Susanto, 2018). Di antara lembaga-lembaga kebudayaan pada masa itu, Lekralah yang paling mendapat perhatian masyarakat khususnya para seniman dan budayawan Indonesia. Keanggotaan Lekra yang pada mulanya hanya terdiri dari beberapa orang saja menjadi lebih dari 500.000. Dan anggota-anggota itu tergabung dalam organisasi massa kebudayaan masing-masing atau terorganisasi dalam lembaga-lembaga sastra dan seni dari Lekra (Aidit, 1964).

Lekra didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950 oleh D.N. Aidit, Njoto, M.S. Ashar, dan A.S. Dharta (Foulcher, 1986). Kelahiran Lekra dinilai sebagai reaksi terhadap realitas politik kultural yang mencemaskan serta melihat jelas, bahwa pengucapan kebudayaan dan sastra khususnya harus berdasarkan realitas yang sedang berkembang, dan pengucapan-pengucapan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara politik (Toer, 2003). Menurut Aidit (1964) berdirinya Lekra merupakan kemenangan daripada satu asas, merupakan bukti kesadaran dan keyakinan akan datangnya kemenangan. Terutama sejak tahun 1951, yaitu tahun kelahiran kembali PKI, pengintegrasian sastra dan seni dengan massa rakyat pekerja dan gerakan revolusioner berjalan dengan dipimpin. Sejak itu front kebudayaan memainkan peranan yang sangat penting dalam barisan progresif. Sikap kebudayaan Lekra dikenal sebagai seni untuk rakyat yang bertujuan melawan kebudayaan kolonial, menolak paham seni untuk seni, dan humanisme universal dari kapitalis borjuis (Susilawati et al.,

2022). Keberadaan Lekra dipicu oleh perbedaan ideologi atau pandangannya terhadap kesenian Gelanggang Seniman Merdeka dengan humanisme universalnya, sedangkan Lekra berpandangan realisme sosialis (Heinschke, 1996). Dalam pandangan Lekra dengan realisme sosialisnya, kebudayaan bukan saja tak dapat dipisahkan dari politik, melainkan kebudayaan merupakan bagian dari politik. Sastra Lekra sebagian besar merupakan upaya untuk memerangi apa yang dianggap “kurang” dalam tradisi sastra Indonesia, yaitu sastra dalam versi “kerakyatan” (Foulcher, 1987).

Lekra memiliki hubungan yang sangat erat dengan PKI, bahkan berdasarkan penjelasan Rosidi (2015) Lekra merupakan bagian dari PKI. Meskipun terdapat tokoh-tokoh Lekra yang menolak organisasi mereka menginduk ke PKI dan berpendapat bahwa Lekra dan PKI merupakan organisasi yang berbeda seperti Njoto dan Joebaar Ajoeb. Njoto sebagai salah satu pendiri Lekra menolak keinginan Ketua PKI D.N. Aidit untuk menjadikan Lekra sebagai organisasi resmi PKI (Hindley, 1988). Joebaar Ajoeb menarik garis antara Lekra dan PKI bahwa di dalam Lekra memang terdapat orang-orang yang menjadi bagian PKI, akan tetapi sebagian besarnya bukan anggota PKI (Novitasari & Utama, 2020). Pandangan Joebaar ditentang oleh Basuki Rasabowo. Menurut Basuki dalam Pusat Data dan Analisa Tempo (2014) bahwa PKI dan Lekra adalah organisasi dengan gerakan aksi yang sama.

Pada dasarnya hubungan antara Lekra dan PKI tidak dapat dipisahkan. Keduanya mengekspresikan ideologi yang sama (Teeuw, 1991). Ketika PKI menetapkan harus jelas antara lawan dan kawan, Lekra juga berpegang demikian. Selain itu, ketika PKI menetapkan politik sebagai panglima, Lekra pun menjadikannya sebagai prinsipnya. Pada kongres pertama Lekra berhasil merumuskan prinsip 1-5-1 yang menjadi pedoman gerakan kebudayaan dan arah kerja Lekra. Prinsip 1-5-1, yaitu kerja kebudayaan dalam garis politik sebagai panglima dengan lima kombinasi; meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, tradisi baik dan kekinian revolusioner, kreativitas individual dan kearifan massa, serta realisme sosial dan romantik revolusioner (Bodden, 2018). Semua itu diaplikasikan dengan metode turun ke bawah.

Meskipun Lekra tidak sepenuhnya berinduk pada PKI, akan tetapi kesamaan ideologi antara Lekra dan PKI menempatkan Lekra dalam posisi yang terfasilitasi. Hubungan PKI dengan Lekra selain pada prinsip dan realisasi politik dapat dilihat dari dukungan PKI terhadap Lekra dalam penerbitan karya sastra. Lekra sebagai lembaga kebudayaan yang membutuhkan organ media untuk menerbitkan karya-karyanya memperoleh tempat di *Harian Rakjat* yang merupakan media yang condong ke arah PKI (Widariyanti, 2022). Pada tahun 1952, dalam halaman mingguan *Ruang Kebudayaan* dari koran PKI *Harian Rakjat* menjadi forum untuk Lekra (Foulcher, 1986). *Harian Rakjat* memiliki cakupan penyebaran yang cukup luas pada masa itu. Pimpinan redaksi *Harian Rakjat* adalah Njoto, seorang *Commite Central* PKI, sehingga tidak dapat dipungkiri kehadiran Njoto di *Harian Rakjat* membuat berita-berita kegiatan PKI dimuat dalam koran tersebut (Yuliantri, 2021). *Harian Rakyat* memiliki peranan penting dalam memperluas pengaruh PKI di Indonesia. Menjelang diselenggarakannya pemilu pertama di Indonesia, pada tahun 1953 PKI secara resmi mengakuisisi *Harian Rakjat* untuk dijadikan sebagai media resminya dalam mengampanyekan diri untuk mendapat dukungan penuh dari rakyat (Firdausi, 2017).

Pada tahun 1959-an setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden, perkembangan Lekra semakin meluas. Konflik antar partai politik semakin menyusut, dan lembaga-lembaga kebudayaan semakin dlenyapkan, Lekralah yang mendominasi pada masa itu. Karya

sastra Lekra yang diterbitkan melalui *Harian Rakjat* mendominasi karya-karya lain yang berseberangan dengan pandangannya. Sejak tahun 1954 surat kabar *Harian Rakjat* meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi 15.000 eksemplar dan pada tahun 1956 menjadi 55.000 eksemplar. Dan seiring berjalannya waktu *Harian Rakjat* menjadi surat kabar yang terbesar di antara surat-surat kabar mana pun yang berafiliasi pada partai (Ricklefs, 2001). Menurut Foulcher (1987) pada bulan Mei 1960 terdapat sekitar 200 cabang Lekra, dan pada bulan Mei 1963 keanggotaannya diklaim mencapai 100.000. Sejak tahun 1959, kolom Lentera di harian kiri *Bintang Timur* menjadi forum kebudayaan sayap kiri di bawah kepemimpinan Pramodya Ananta Toer, sedangkan setelah bulan Juli 1963, halaman mingguan *Harian Rakjat* diperluas menjadi surat kabar edisi minggu penuh, yang sebagian besar dikhususkan untuk isu-isu "seni dan budaya".

Salah satu bentuk karya sastra Lekra yang nyaris saban hari dimuat sekitar tahun 1961 di *Harian Rakjat* adalah cerpen (Yuliantri et al., 2008). *Harian Rakyat* yang sebagai corong PKI dapat dikatakan sangat intens dalam menerbitkan cerpen-cerpen Lekra dikarenakan cerpen-cerpen Lekra memuat kepentingan-kepentingan politik PKI yang digunakan untuk mempengaruhi dan memobilisasi massa. Pada tahun 1963, sekelompok cendekiawan menantang Lekra dengan memproklamasikan Manifesto Kebudayaan yang menghendaki suatu kebudayaan nasional tidak didominasi oleh ideologi politik tertentu (Ricklefs, 2001). Pada tahun 1965, ketika PKI dibabat habis oleh Orde Baru, Lekra pun turut lenyap beserta karya-karyanya dan *Harian Rakyat* juga tidak lagi terbit. Gerakan 30 September 1965 membersihkan berbagai macam di dalam masyarakat khususnya yang terlibat terhadap PKI. Pelenyapan terhadap karya-karya Lekra juga menunjukkan keterlibatannya dengan PKI. Menurut Foulcher (1986) daftar pustaka pada bagian *Indonesian Literary Works*, yang merupakan daftar sastra Indonesia paling lengkap, hanya berisi segelintir publikasi sosialis, yang bukan disengaja tapi karena pelarangan dan penghancuran sastra Indonesia beraliran kiri yang dimulai 1965. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor tradisi kajian terhadap karya sastra Lekra masih sedikit khususnya cerpen-cerpen Lekra yang pada masa kejayaannya terbit saban hari.

Penelitian terhadap karya sastra Lekra pernah dilakukan oleh Artika (2017; 2014, 2016) yang menghasilkan beberapa temuan. Pertama, puisi dan musik Lekra menunjukkan bahwa Lekra memandang keberadaan bahasa daerah berdasarkan ideologi kerakyatan, bahasa yang tumbuh di tengah rakyat, bahasa yang terhormat setara bahasa Indonesia, bahasa yang dapat memikul fungsi revolusioner. Kedua, karya sastra Lekra berupa puisi dan cerpen dalam buku *Antologi Gugur Merah* dan *Laporan Dari Bawah* merepresentasikan ideologi Marxisme. Ketiga, cerpen Lekra berjudul *Subang* karya Ira, *Istri Kawanku* karya Jadi, *Atik* karya Koe Irmanto, *Menyambut Kongres Nasional ke-VI PKI* karya L.S. Retno, dan cerpen *Pesta Rakyat* karya Namikakanda menunjukkan bahwa cerpen-cerpen tersebut merupakan cerpen propaganda yang mendukung agenda perjuangan PKI. Dengan demikian, ketiga penelitian yang dilakukan oleh Artika menghasilkan temuan mengenai representasi ideologi, pandangan terhadap bahasa daerah dan propaganda PKI dalam karya sastra Lekra.

Penelitian lain terhadap cerpen-cerpen Lekra pernah dilakukan oleh Zulfikar et al. (2021) yang membahas 26 cerpen sastrawan Lekra sebagai objek kajian dengan menggunakan teori hermeneutika fenomenologi yang digagas oleh Paul Ricoeur. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa cerpen-cerpen Lekra merepresentasikan gerakan resistensi kaum tani dan buruh dalam upaya-upaya perlawanan menentang penindasan oleh kaum yang dominan. Bentuk-bentuk resistensi terbuka kaum tani dan buruh dalam

cerpen-cerpren Lekra, yaitu pengorganisasian, pengutamaan kepentingan bersama, dan penghapusan pihak dominasi. Sementara Wulandari (2016) membahas sembilan cerpen Lekra dalam buku *Laporan Dari Bawah* yang menghasilkan temuan adanya konflik pelaksanaan Land Reform pada tahun 1960-1965 dalam sembilan cerpen Lekra.

Penelitian-penelitian terhadap karya sastra Lekra yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti berkaitan dengan representasi ideologi, pandangan terhadap bahasa daerah, propaganda PKI dalam karya sastra Lekra (Artika, 2017; 2014, 2016), resistensi kaum tani dan buruh dalam karya sastra Lekra (Zulfikar et al., 2021), dan konflik pelaksanaan Land Reform Tahun 1960-1965 (Wulandari, 2016). Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini mengisi rumpang penelitian terhadap karya sastra Lekra dengan menitikfokuskan pada persoalan muatan dan tujuan karya sastra Lekra sebagai bagian dari strategi politik PKI dalam memenangkan kontestasi politik di Indonesia pada tahun 1950—1965 melalui analisis terhadap cerpen-cerpren Lekra yang berjudul *Paman* karya L.S. Retno, *Gambar Pemimpin* karya Saibun, *Kebangunan di Kota Bengawan* karya Namikakanda dan *Loper* karya Putu Oka.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka. Penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta di dalam suatu objek berdasarkan kata-kata dengan memfokuskan pada konseptual (Jabrohim, 2001). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah cerpen-cerpren Lekra yang berjudul *Paman* karya L.S. Retno, *Gambar Pemimpin* karya Saibun, *Kebangunan di Kota Bengawan* karya Namikakanda dan *Loper* karya Putu Oka. Keempat cerpen tersebut dimuat dalam antologi *Laporan dari Bawah: Sehimipun Cerita Pendek Lekra Harian Rakjat 1950—1965*. Sementara sumber data sekunder berupa informasi berbagai bacaan, baik dalam bentuk buku, artikel, majalah, berita, *website* dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan teknik mengutip secara langsung (Ratna, 2010).

Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kritis dengan kerangka pikir sosiologis dalam perspektif Rene Wellek dan Austin Warren. Menurut Wellek & Warren (1956), terdapat tiga model pendekatan dalam kajian sosiologi sastra. Pertama, pendekatan terhadap posisi pengarang sebagai pembuat karya dan sebagai anggota masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, ideologi, politik dan lain-lain. Kedua, pendekatan terhadap muatan karya sastra itu sendiri dan bagaimana tujuannya serta hal-hal yang tersirat di dalamnya. Ketiga, pendekatan mengenai dampak karya sastra terhadap pembaca, sejauh mana karya sastra membawa perubahan dan perkembangan sosial. Berdasarkan ketiga model tersebut, fokus penelitian ini menggunakan model yang kedua, yaitu menempatkan muatan dan tujuan karya sastra itu sendiri sebagai objek utama serta mengorelasikan dengan realitas sosial dan politik yang terjadi di luar karya sastra.

C. Pembahasan

Lekra sebagai lembaga kebudayaan yang menempatkan “politik sebagai panglima” sebagai prinsip dan asas dalam pengejawantahan mukadimahnyanya, sudah tentu jelas bahwa karya-karya yang dilahirkan oleh Lekra seperti cerpen memiliki muatan yang sarat dengan

tujuan-tujuan politik di dalamnya. Dalam pembahasan ini muatan dan tujuan serta strategi politik PKI di dalam cerpen-cerpen Lekra yang diterbitkan pada tahun 1950—1965 di *Harian Rakjat* diuraikan sebagai berikut.

1. Pengorganisasian Kaum Tani dan Kaum Perempuan

Dalam dua cerpen Lekra *Paman* karya L.S. Retno dan *Gambar Pemimpin* karya Saibun terdapat muatan-muatan yang mengandung tujuan memengaruhi rakyat sebagai pendukung PKI. Cerpen *Paman* karya L.S. Retno diterbitkan pada tahun 1965 di *Harian Rakjat*. L.S Retno menggunakan sudut pandang pertama dalam cerpen *Paman* dengan tokoh Budi yang digambarkan sebagai pelajar kota yang liburan ke desa pamannya. Pamannya merupakan seorang lurah yang memiliki sawah yang luas di desanya. Sebagai pemilik sawah yang luas, tokoh paman digambarkan hidup dari sawah tersebut tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun, karena paman memperkerjakan kaum buruh tani untuk menggarap sawahnya dan paman hanya menikmati hasilnya. Dalam hal ini, tokoh paman dianggap telah mengeksploitasi diri kaum tani oleh organisasi kaum tani, sehingga tokoh paman mendapatkan perlawanan dari organisasi kaum tani yang dipimpin oleh tokoh komunis, Sasmito.

- (1) Mereka mulai bercerita tentang keadaan paman dan bagaimana penghisapan paman yang dilakukan atas diri kaum tani. Paman memang seorang penguasa desa yang jahat, itulah kesimpulanku. Demikian juga kesimpulan organisasi tani di desa (Retno, 2008, p. 148).

Kutipan (1) menjelaskan tokoh Budi dalam cerpen *Paman* sebagai kaum pelajar kota membela perjuangan kaum tani yang dipimpin oleh Sasmito. Begitu juga dengan tokoh Umi, yaitu anak paman yang belajar di kota yang turut membela perjuangan kaum tani dan menyarankan ayahnya untuk menyerahkan sawah-sawah kepada rakyat yang membutuhkan. Tokoh Budi dan Umi digambarkan sebagai kalangan terpelajar bertujuan sebagai pembenaran atas tindakan Sasmito yang mengorganisir kaum tani untuk melakukan perlawanan terhadap tokoh paman. Bentuk perlawanan tersebut sebagaimana dalam kutipan (2).

- (2) Dikatakan bahwa kaum tani sudah bangkit melawan, tidak mau membayar sewa tanah, tidak mau mengembalikan tanah gadai kepada Paman (Retno, 2008, p. 151).

Kutipan (1) dan (2) dalam cerpen *Paman* menunjukkan perjuangan kaum tani yang tertindas oleh kekuasaan lurah sekaligus tuan tanah yang dapat diklasifikasikan sebagai pemilik modal. Tokoh Sasmito dalam cerpen itu berperan memengaruhi dan mengorganisasi rakyat untuk membentuk perlawanan, sementara tokoh Budi dan Umi berperan memengaruhi tokoh paman sebagai pemilik modal dalam wilayah produksi untuk menyerahkan sawah-sawahnya kepada rakyat yang membutuhkan. Hal tersebut menunjukkan adanya pendefinisian tokoh Sasmito, Budi, dan Umi terhadap tokoh paman sebagai setan desa yang harus dimusuhi. Sebagaimana dalam White (2016) bahwa tujuh setan desa yang menghisap darah petani, yaitu tuan tanah, lintah darat, pembeli hasil panen, tengkulak, kapitalis birokratis (mereka yang menggunakan sumber daya pemerintah untuk menekan petani agar menjual produk mereka kepada perusahaan negara dengan

harga rendah), bandit desa (orang kuat setempat yang melakukan kejahatan untuk membela kepentingan kelas-kelas yang mengeksploitasi), dan pejabat desa yang jahat.

Latar cerpen Lekra tersebut yang menunjukkan kondisi Indonesia pada tahun 1950—1965, muatan komunis merujuk pada Partai Komunis Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari tokoh Sasmito sebagai seorang komunis yang memimpin perlawanan kaum tani yang terhimpun dalam organisasi kaum tani. Organisasi kaum tani di Indonesia yang dipimpin oleh seorang komunis merujuk pada suatu organisasi yang berafiliasi dengan PKI, yaitu Barisan Tani Indonesia. Pada kongres Nasional ke-V PKI dinyatakan bahwa PKI harus melakukan pengintegrasian dengan kaum tani melalui penetrasi terhadap BTI. Hasil dari kongres tersebut merumuskan pentingnya rumusan persatuan nasional dan pembangunan partai di kalangan kaum tani (Aidit, 1954). Selain itu, muatan komunis yang merujuk pada PKI menjadi lebih jelas dalam cerpen *Paman* dengan adanya penggambaran perlawanan organisasi kaum tani terhadap tokoh paman yang dipimpin oleh Sasmito memperoleh bantuan dari organisasi Pemuda Rakyat. Pemuda Rakyat merupakan organisasi pemuda yang berafiliasi langsung dengan PKI. Organisasi ini pertama kali dibentuk sebagai Pemuda Sosialis Indonesia (Persindo). Namun pada tahun 1950, Pesindo mengadakan kongres ketiganya di Jakarta, di mana dikeluarkan resolusi bahwa Pesindo berganti nama menjadi Pemuda Rakyat (Vermeij, 2022). Bantuan dari organisasi Pemuda Rakyat terhadap kaum tani sebagaimana kutipan (3).

- (3) Sasmito tertawa senang menyambutku. “Bandit-bandit desa sudah ditangkap dan ditahan berkat bantuan Pemuda Rakjat” kata Sasmito bangga (Retno, 2008, p. 151).

Sedangkan cerpen *Gambar Pemimpin* karya Saibun menggambarkan tokoh utama Murni sebagai anggota Gerwani yang mendukung D.N. Aidit. Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) didirikan sebagai Gerwis (Gerakan Wanita Sedar), yang menurut Wieringa (2003) sesuai dengan kebijakan PKI setelah kongres Gerwani pada tahun 1954. Meskipun Gerwis selalu menegaskan sebagai non-politik dan tidak mempunyai kaitan dengan parpol mana pun, sebagaimana yang termaktub dalam anggaran dasarnya. Akan tetapi, pengaruh PKI sudah mengakar sangat dalam pada organisasi tersebut. Keinginan PKI untuk membangun organisasi wanita yang dapat dikontrolnya, tentu saja bukan merupakan faktor terbentuknya Gerwis (Afifi & Kristianwantoni, 2019). Perubahan dari Gerwis menjadi Gerwani merupakan perubahan dari sebuah organisasi kader menjadi organisasi yang menggalang massa perempuan seluas-luasnya (Nimat, 2009). Tokoh Murni sebagai anggota Gerwani sering kali mendapatkan pertentangan dari suaminya, Kodim. Kodim memiliki pandangan yang berlawanan dengan Murni, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga. Kodim dalam cerpen digambarkan sebagai pendukung Sutan Sjahrir yang merupakan pemimpin Partai Sosialis Indonesia, sehingga tindakan Murni yang tergabung dalam Gerwani dan mendukung D.N. Aidit, pemimpin PKI itu mendapatkan penolakan dari Kodim.

- (4) Mau melagak lagi, sahut Kodim dengan mata yang merah. Kukatakan kepadamu: jangan coba menghina partaiku, jangan pernah ke rapat umum komunis itu nanti, kau harus keluar dari Gerwani, tau? (Saibun, 2008, p. 366).

Dari kutipan (4) dalam cerpen *Gambar Pemimpin* dapat terlihat adanya hubungan antara anggota Gerwani dengan komunis yang merujuk pada PKI. Pada awal tahun 1950-

an, ketegangan dalam kontestasi politik yang mengakibatkan masyarakat Indonesia semakin mengalami politisasi dan polarisasi, Gerwani menjadi semakin dekat dengan PKI. Tidak sedikit dari anggota Gerwani sekaligus menjadi anggota PKI (Afifi & Kristianwantoni, 2019). Sebagaimana yang dilakukan tokoh Murni di dalam cerpen, ia berencana menghadiri rapat umum PKI menunjukkan adanya keterlibatan Murni sebagai anggota Gerwani dengan PKI. Dukungan Murni terhadap PKI ditunjukkan dengan kebanggaannya terhadap pemimpin PKI, D.N. Aidit. Ia membanggakan pemimpin partai itu di depan suaminya yang merupakan pendukung partai Sutan Sjahrir.

- (5) Tengoklah Bang. Pemimpin rakyat ini masih muda dan selama angkatan muda ini yang memimpin pergerakan rakyat pekerja di Indonesia ini, banyak sekali kemajuan-kemajuannya. Huh, Kodim mencemooh, rupanya kau ini sebagai anggota Gerwani sudah diajari jadi orang komunis, ya. Kodim bangkit lalu mengambil gambar Sjahrir dari dinding (Saibun, 2008, p. 365).

Kutipan (5) dalam cerpen *Gambar Pemimpin* sangat jelas menunjukkan bahwa Gerwani meskipun tidak pernah secara resmi menjadi bagian dari PKI, tetapi pengaruh PKI dalam tubuh Gerwani tidak dapat dipungkiri. Pada tahun 1955 anggota Gerwani mencapai 400.000 orang, sedangkan pada tahun 1957 mencapai 663.740 orang (Afifi & Kristianwantoni, 2019). Jumlah anggota tersebut menjadikan keterlibatan Gerwani dalam kontestasi politik memberikan sumbangan besar untuk kemenangan PKI sebagaimana yang digambarkan oleh tokoh Murni.

Pada dasarnya cerpen *Gambar Pemimpin* menunjukkan bahwa konflik politik yang terjadi di Indonesia sampai mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Murni dan Kodim karena perbedaan pandangan politik. Berbeda dengan rumah tangga Salma dan Maksum, yang digunakan dalam cerpen ini sebagai pembanding sebagaimana kutipan (6).

- (6) Orang sebelah rumahnya ini adalah kenalan baik dan kawannya seorganisasi. Suaminya anggota BTI. Jadi kedua suami istri tetangga Murni sehilir semudik dalam pergerakan dan dengan sendirinya segala kekurangan di rumah tangga mereka dengan rembulan dan kerukunan dapat diatasi bersama (Saibun, 2008, p. 367).

Rumah tangga Salma dan Maksum yang digambarkan sebagai rumah tangga yang harmonis sebagaimana kutipan (6) dalam cerpen *Gambar Pemimpin*, seolah-olah menunjukkan rumah tangga yang harmonis itu seorang istri yang tergabung dalam Gerwani dan suami yang tergabung dalam BTI, yang keduanya mendukung PKI. Hal ini diperjelas dengan kegigihan tokoh Murni yang ingin menjadikan Kodim berpandangan sama dengannya, yaitu mendukung PKI untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya dan menciptakan suatu keharmonisan. Antara tahun 1950 sampai 1960, "keluarga" merupakan institusi yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat sosialis Indonesia yang dicirikan oleh apa yang disebut sebagai identitas Indonesia, sehingga sejumlah karya sastra Lekra mempromosikan keluarga yang ideal (Setiadi et al., 2023). Dalam cerpen *Gambar Pemimpin* penyelesaian konflik yang terjadi pada tokoh Murni dan Kodim dapat dicapai dengan perubahan pandangan Kodim pada mulanya mendukung Sutan Sjahrir menjadi pendukung D.N. Aidit. Perubahan pandangan Kodim tersebut menjadikan keluarganya menjadi harmonis sebagaimana yang direpresentasikan dalam cerpen melalui kutipan (7).

- (7) Kodim lalu memungut gambar Sjahrir dari meja dan meletakkan ke tepi dinding di balik tiang rumahnya. Dan dengan bersama-sama kedua suami istri pergi ke dapur dan makan bersama-sama setelah tiga hari tiga malam mereka makan dan tidur sendiri-sendiri (Saibun, 2008, p. 371).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas menjadi jelas bahwa cerpen Lekra *Paman* karya L.S. Retno dan *Gambar Pemimpin* karya Saibun, keduanya memuat tujuan memengaruhi rakyat khususnya kaum tani dan kaum perempuan untuk bergabung dalam BTI atau Pemuda Rakyat dan Gerwani, yang ketiganya itu merupakan organisasi yang berafiliasi dengan PKI. Cerpen *Paman* menghadirkan konflik eksploitasi paman sebagai lurah sekaligus tuan tanah terhadap kaum petani, diselesaikan dengan perlawanan kaum tani dalam suatu gerakan yang terorganisasi yang dipimpin oleh seorang komunis dan dibantu oleh organisasi Pemuda Rakyat dimaksudkan untuk memengaruhi para petani untuk melakukan perlawanan terhadap tuan tanah agar terciptanya kesejahteraan petani. Adapun perlawanan tersebut akan dapat dimenangkan dengan bergabung dalam organisasi kaum tani yang berafiliasi dengan PKI. Dengan itu, akan terciptanya pandangan masyarakat khususnya di kalangan petani bahwa hanya PKI yang dapat menjamin kesejahteraan kaum tani. Sementara cerpen *Gambar Pemimpin* menghadirkan konflik rumah tangga yang dialami oleh Murni dan Kodim diselesaikan dengan beralihnya pandangan Kodim dari pendukung Sutan Sjahrir menjadi pendukung D.N. Aidit bertujuan untuk membangun pandangan rumah tangga yang ideal dan harmonis adalah rumah tangga yang terbentuk dari organisasi yang sama-sama berafiliasi dengan PKI. Dengan terbentuknya pandangan-pandangan tersebut maka akan dapat memperluas massa dalam organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI, sekaligus memperkuat dukungan terhadap PKI dalam kontestasi politik di Indonesia. Sebagaimana menurut keterangan Mortimer (2006) bahwa BTI mengklaim memiliki 7,1 juta anggota pada tahun 1963. Pada awal tahun 1963, jumlah anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani masing-masing mencapai 1,5 juta orang Ricklefs (2001). Dari jumlah anggota BTI, Pemuda Rakyat dan Gerwani tersebut tentu memberikan sumbangan yang besar bagi PKI.

2. Permusuhan Partai PKI dengan Masyumi dan PSI

Kontestasi partai politik yang sangat ketat dalam memenangkan dukungan masyarakat pada pemilu pertama di Indonesia menjadi kontras antara kawan dan lawan. Tidak sedikit dari sastrawan-sastrawan Lekra dalam kontestasi tersebut turut membedakannya dengan jelas dalam karya-karyanya. Salah satu cerpen Lekra yang menggambarkan realitas pada masa itu, yaitu cerpen *Kebangunan di Kota Bengawan* karya Namimakanda. Cerpen itu menghadirkan tokoh Aku dan tokoh seorang bapak-bapak dari daerah Pedan, yang keduanya sebagai pendukung PKI. Dalam percakapan antara kedua tokoh tersebut dapat terlihat dengan jelas kebanggaan keduanya terhadap PKI. Kebesaran PKI dibangun melalui percakapan kedua tokoh dengan saling menceritakan pengalaman mengikuti rapat umum PKI yang begitu meriah dan dihadiri oleh jutaan orang dari berbagai pelosok daerah. Hal yang menarik dari cerpen ini, yaitu selain menggambarkan kebanggaan kedua tokoh terhadap PKI juga menegaskan musuh-musuh PKI.

Dalam cerpen *Kebangunan di Kota Bengawan*, penggambaran musuh-musuh PKI dapat terlihat dari percakapan yang dibangun oleh kedua tokoh. Tokoh seorang bapak-bapak menceritakan daerahnya, Pedan yang menjadi tempat berkumpulnya ribuan petani yang mendukung PKI. Pedan sebagai daerah Islam, akan tetapi mayoritas penduduknya

merupakan pendukung PKI. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan beragama Islam tidak harus memilih bergabung dengan partai-partai yang berideologi Islam, akan tetapi dapat juga bergabung dengan PKI yang berideologi komunisme sebagaimana penduduk Pedan. Penggambaran Pedan dengan mayoritas penduduknya seorang muslim bahkan sudah memperoleh predikat Haji yang digambarkan sebagai pendukung PKI itu cukup menjadi pukulan keras terhadap orang-orang Islam yang mendukung partai-partai Islam seperti Masyumi. Selain itu, Masyumi dihadirkan dalam cerpen sebagai partai yang tidak dapat mewadahi kepentingan-kepentingan rakyat sekalipun rakyat itu muslim sebagaimana dalam kutipan (8).

- (8) "Mengapa pilih P.K.I. Mengapa tidak Masjumi?"
"Itu ada sebabnya Nak."
"Mengapa?"
"P.K.I. memperjuangkan tanah untuk kami. Kau tahu, buat kami tanah adalah jiwa kami. Dan P.K.I. adalah otak kami."
"Masjumi?"
"Ia menentang tuntutan kami." (Namikakanda, 2008, p. 246).

Masyumi merupakan salah satu partai Islam yang turut berpartisipasi dalam pergulatan partai politik pada tahun 1950-an. Pada tahun 1957 Masyumi menggelar Mukhtar Ulama se-Indonesia di Palembang yang memfatwakan bahwa komunisme haram bagi kaum muslim dan bahwa PKI harus dilarang (Ricklefs, 2001). Masyumi sebagai partai yang berasaskan Islam digambarkan dalam cerpen sebagai lawan rakyat di daerah dengan mayoritas pemeluk agama Islam menjadi serangan tajam bagi Masyumi, sedangkan PKI digambarkan sebagai bagian yang melekat dalam tubuh rakyat. Hal ini bertujuan memengaruhi rakyat yang beragama Islam agar menempatkan partai Masyumi sebagai lawan dengan alasan karena Masyumi dianggap tidak dapat memenuhi tuntutan rakyat khususnya para petani dalam memperjuangkan tanah.

Selain partai Masyumi, PKI juga memperjelas permusuhannya dengan PSI yang termuat dalam cerpen *Kebangunan di Kota Bengawan*. PSI merupakan partai yang menganut paham sosialisme berdasarkan pada ajaran Marx-Eagels, yang mengakui perjuangan kelas sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat kapitalis dan memiliki tujuan menjadikan masyarakat sosialis (Argenti, 2017; Rusdi, 1997). PSI digambarkan dalam cerpen tersebut sebagai partai yang sama dengan partai Masyumi, yang tidak dapat memenuhi tuntutan rakyat. Masyumi dan PSI dicitrakan dengan buruk melalui penghadiran sajak yang ditempel di depan pintu rumah tokoh Aku. Sajak yang ditempel di depan pintu rumah yang memuat keburukan Masyumi dan PSI sebagai partai jurang kemiskinan rakyat itu menunjukkan bahwa rakyat pendukung PKI pada masa itu secara terang-terangan dalam memusuhi lawan-lawan PKI. Kutipan sajak itu sebagai berikut.

- (9) Kalau kau jemu menjadi orang miskin,
Pilihlah P.K.I.
Kalau kau ingin menjadi orang miskin,
Pilihlah Masjumi-P.S.I. (Namikakanda, 2008, p. 248).

Kutipan (9) dalam cerpen *Kebangunan di Kota Bengawan* menekankan kepada masyarakat khususnya pembaca cerpen tersebut untuk tidak memilih dan bergabung dengan kedua partai tersebut yang jelas-jelas menjadi musuh PKI. Hal tersebut juga dapat

dikatakan bahwa tujuan akhirnya adalah agar masyarakat hanya mendukung dan bergabung dengan PKI. Hal ini sesuai dengan lawan PKI dalam kontestasi politik pemilu pertama di Indonesia. D.N. Aidit (1954) dalam Kongres Nasional ke-V PKI menyatakan bahwa PSI dan Masyumi mengibarkan panji-panji anti-komunis, oleh karena itu menyebabkan PKI dengan sekuat tenaga melawan partai-partai tersebut. Politik anti-komunis PSI dan Masyumi merupakan halangan terbesar dalam usaha menggalang persatuan di kalangan rakyat. Pada tahun 1960, Masyumi dan PSI dilarang oleh Soekarno. Soekarno menghendaki persatuan antara nasionalisme, Islam, dan komunisme (Bathoro, 2018; Niwandhono, 2021). Hal ini jelas menguntungkan PKI sebagai partai yang mewakili komunisme. Kedekatan Soekarno dengan PKI dalam cerpen *Kebangunan di Kota Bengawan* digambarkan dengan gambar-gambar Bung Karno yang turut menyertai dalam rapat besar PKI sebagaimana kutipan (10).

- (10) Bendera Merah Putih dan Bendera Merah ber-Palu Arit menghiasi dinding podium itu dengan megahnya. Gambar-gambar Bung Karno, Aidit, Njoto, Lukman ikut menyaksikan rapat raksasa tersebut (Namikakanda, 2008, p. 248).

Kutipan (10) dalam cerpen *Kebangunan di Kota Bengawan* menunjukkan adanya keterlibatan Soekarno dalam rapat raksasa PKI. Hal tersebut mengindikasikan adanya dukungan yang diberikan kepada PKI. Soekarno (1965) dalam pidatonya pada rapat raksasa ulang tahun ke-45 PKI menyatakan, “Partai Sosialis Indonesia yang sudah saya bubarkan itu selalu menepuk-nepuk dada: Kami Marxis, kami Marxis, kami Marxis! Saya berkata, mereka bukan Marxis! Mereka adalah pencoleng daripada Marxisme. Karena itu aku tidak mau memakai perkataan Nasamarx (Nasionalisme, Agama, Marxisme). Kalau aku memakai perkataan Nasamarx, jangan-jangan nanti orang-orang PSI juga ikut-ikutan di dalam Nasamarx ini. Padahal mereka adalah kontra-revolusioner, padahal mereka adalah revisionis tulen, pada hal mereka adalah pencoleng Marxisme!”. Selain itu, dukungan Soekarno terhadap PKI dalam memusuhi Masyumi karena Soekarno menganggap Masyumi sebagai pembangkang yang selalu menentang kebijakan-kebijakannya (Siregar, 2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa Soekarno sebagai presiden lebih berpihak pada PKI dan menunjukkan ketidakberpihakannya terhadap partai Masyumi dan PSI.

3. Dukungan terhadap *Harian Rakjat*

propaganda PKI. Njoto, wakil pimpinan PKI, adalah pemimpin redaksi surat kabar *Harian Rakjat*. Dia sangat aktif dan berpengaruh di *Harian Rakjat*. *Harian Rakjat*, melalui redaktur dan jurnalisnya, berkontribusi dalam kontestasi politik dengan cara menyisipkan muatan propaganda-propaganda PKI (Groves, 1983). Propaganda dalam publikasi *Harian Rakjat* adalah bentuk-bentuk pengorganisasian ideologi terhadap rakyat khususnya kaum buruh dan tani yang kemudian dapat menjadi basis kelompok-kelompok partai.

Setelah tahun 1952, tidak sedikit surat kabar berafiliasi atau dimiliki langsung oleh partai politik yang dipersiapkan untuk pemilihan umum yang dijadwalkan pada tahun 1955. Surat kabar adalah metode yang mudah dan efisien untuk mengkomunikasikan program dan kebijakan partai. Dalam hal tersebut, PKI mengakui kepemilikan *Harian Rakjat* pada tahun 1953 (Rakhmanto, 2018). Sebelum dimiliki PKI, pada dasarnya *Harian Rakjat* belum menjadi media propaganda PKI. Akan tetapi, kehadiran Njoto sebagai pimpinan redaksi tidak dapat dipungkiri membuat *Harian Rakjat* mulai adanya kepentingan-kepentingan PKI

di dalamnya. Setelah menjadi media PKI, *Harian Rakjat* memiliki tujuan untuk mewujudkan kesadaran atas ideologi partai, dan menciptakan kepercayaan dan keyakinan rakyat khususnya kaum buruh dan tani terhadap PKI. Menurut Rizky (2018), surat kabar *Harian Rakjat* pada tahun 1951—1955 menjadi salah satu sarana kampanye politik yang digunakan oleh PKI. Pada tahun 1958, ulang tahun ketujuh berdirinya *Harian Rakjat*, D.N. Aidit pimpinan partai PKI menegaskan bahwa peran *Harian Rakyat* adalah melawan tekanan ideologis 'musuh rakyat', menanamkan ideologis komunis, memperluas anggota partai, dan menyadarkan rakyat (Groves, 1983). Hal tersebut kemudian memunculkan pandangan bahwa *Harian Rakjat* merupakan alat propaganda PKI pada tahun 1959—1965 (Rizky, 2018).

Cerpen *Loper* karya Putu Oka menggambarkan dua tokoh bersaudara adik dan kakak yang bekerja sampingan menjadi loper koran *Harian Rakjat*. Pekerjaan utama adik sebagai guru, sementara pekerjaan utama kakak sebagai anggota partai. Pekerjaan menjadi loper dianggap sebagian orang sebagai pekerjaan rendahan dengan gaji yang cukup kecil, sebagaimana anggapan teman sesama guru terhadap tokoh adik bahwa seorang guru menjadi loper adalah hal yang memalukan. Akan tetapi kedua tokoh bersaudara tersebut tetap gigih untuk menjadi loper dengan alasan bahwa pekerjaan loper merupakan pekerjaan yang mulia, sebagai bentuk pengabdian terhadap partai.

- (11) Akhirnya keduanya mengambil kesimpulan untuk tetap membantu partai untuk menjadi loper. Peranan yang menentukan dari *Harian Rakjat* makin disadarinya dan akibat kecintaannya kepada partai, hasrat untuk menghentikan kerjanya jadi terurung (Oka, 2008, p. 302).

Kutipan (11) dalam cerpen *Loper* menunjukkan bahwa *Harian Rakjat* merupakan bagian dari partai, sehingga dalam cerpen *Loper* dihadirkan tokoh kakak yang memiliki pandangan bahwa dengan bekerja sebagai loper sama halnya dengan menjalankan tugas partai, karena pada dasarnya *Harian Rakjat* itu untuk kepentingan partai.

Salah satu kepentingan partai, yaitu penyebaran dan penanaman ideologi terhadap rakyat untuk menjadi pendukung partai. Orientasi *Harian Rakjat* bukan semata sebagai bisnis yang menghasilkan uang dari hasil pembayaran pelanggan. Akan tetapi penyebaran dan penanaman ideologi partai yang dinomorsatukan. Hal ini dapat dibuktikan dari tindakan tokoh adik yang memberikan koran *Harian Rakjat* terhadap pelanggan yang sukar membayar. Sebagai orang yang profesional tentu tidak akan melakukan tindakan tersebut karena akan merugikan *Harian Rakjat* itu sendiri. Namun, tokoh adik tetap membagikan koran *Harian Rakjat* tersebut sebagaimana kutipan (12).

- (12) Kawan ini sukar memenuhi tagihan.” Dalam pikirannya tetap berkecamuk antara memberikan atau tidak. Kemudian sekali dia teringat dengan pekerjaan kawannya itu. “Dia seorang pesuruh, mungkin untuk dimakan saja tak cukup. Tapi dia membutuhkan bacaan ini. *Harian Rakjat*.” Dan akhirnya tangannya memasukkan juga lembaran koran melalui lubang pintunya (Oka, 2008, p. 301).

Kutipan (12) dalam cerpen *Loper* menunjukkan seorang pesuruh dapat dikategorikan sebagai kaum buruh. Tokoh adik pada dasarnya menyadari bahwa kaum buruh merupakan massa yang potensial sebagai pendukung pergerakan partai, sehingga *Harian Rakjat* yang harus tetap disebarkan meskipun sukar memenuhi tagihan biaya langganan.

Kegigihan tokoh adik dan kakak mendukung *Harian Rakjat* dengan menjadi loper yang dihadirkan dalam cerpen *Lekra* itu menunjukkan adanya beberapa tujuan yang merujuk

pada hubungan antara *Harian Rakjat*, PKI, dan Lekra. Pertama, memengaruhi rakyat untuk turut memperjuangkan perluasan penyebaran *Harian Rakyat* di tengah-tengah masyarakat agar menjadi media harian yang besar. Kedua, dengan tersebarnya koran *Harian Rakyat* maka dapat dengan mudah menanamkan ideologi komunis dan kecintaan terhadap PKI. Ketiga, ketika *Harian Rakyat* menjadi media yang besar maka karya-karya Lekra sangat berpotensi dapat menguasai karya-karya lainnya.

D. Penutup

Sastra pada masa kontestasi politik tahun 1950—1965 tidak lahir dengan sendirinya melainkan adanya pengaruh politik yang terjadi pada masa itu. Pada tahun tersebut Lekra sebagai lembaga kebudayaan yang memegang prinsip politik sebagai panglima melahirkan cerpen-cerpren yang sarat dengan muatan politik. Dalam cerpen-cerpren Lekra *Paman* karya L.S. Retno, *Gambar Pemimpin* karya Saibun, *Kebangunan di Kota Bengawan* karya Namikakanda dan *Loper* karya Putu Oka, yang dimuat dalam antologi *Laporan dari Bawah: Sehimpun Cerita Pendek Lekra Harian Rakjat 1950—1965*, pada dasarnya semuanya mengandung tujuan-tujuan untuk kepentingan politik PKI.

Cerpren Lekra *Paman* karya L.S. Retno dan *Gambar Pemimpin* karya Saibun memuat tujuan untuk memengaruhi kaum tani dalam gerakan organisasi kaum tani BTI dan kaum perempuan dalam gerakan wanita Gerwani agar mendukung PKI. Cerpren *Kebangunan di Kota Bengawan* karya Namikakanda memuat tujuan untuk memusuhi lawan-lawan PKI seperti PSI dan Masyumi yang pada akhirnya kedua partai itu dilarang oleh Soekarno. Sedangkan *Loper* karya Putu Oka bertujuan untuk memengaruhi rakyat khususnya pendukung partai agar turut menyebarkan koran *Harian Rakjat*.

Hubungan sastra Lekra, politik PKI, dan media *Harian Rakjat* terbentuk karena adanya kepentingan PKI untuk memperoleh dukungan rakyat dalam kontestasi politik. PKI menggunakan cerpen-cerpren Lekra sebagai alat mempengaruhi pikiran rakyat untuk mendukung PKI dan *Harian Rakjat* digunakan sebagai media penyebarannya. Lekra sebagai lembaga kebudayaan membutuhkan media penerbitan, sehingga dengan tersebar luasnya media *Harian Rakyat* maka Lekra semakin menunjukkan eksistensinya melalui karya-karyanya yang terfasilitasi oleh media *Harian Rakyat*. Dengan itu, PKI dapat meningkatkan massa pendukung untuk kemenangannya dalam kontestasi politik yang terjadi pada tahun 1950—1965.

Daftar Pustaka

- Afifi, R. I., & Kristianwantoni, S. (2019). Gerwani in the Communist Ideology of 1950—1965. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora*, 3(1), 10–20. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/690>
- Aidit, D. N. (1954). *Kongres Nasional Ke-V Partai Komunis Indonesia*.
- Aidit, D. N. (1964). *Dengan Sastra dan Seni yang Berkepribadian Nasional Mengabdikan Buruh: Tani dan Pradjurit. (Pokok2 Referat Dihadapan Konfernas Sastra dan Seni Revolusioner di Jakarta, diutjapkan tgl. 28 Agustus 1964)*. Jajasan Pembaruan.
- Argenti, G. (2017). Kiprah Politik Partai Sosialis Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(1), 1–14. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/935>

- Artika, I. (2017). Bahasa Daerah dan Ideologi Kerakyatan: Puisi dan Musik Lekra (1950—1965). *Seminar Nasional Bahasa Ibu X*, 54–71.
- Artika, I. W. (2014). *Representasi Ideologi dalam Sastra Lekra: Kajian New Historicism Antologi Gugur Merah dan Laporan dari Bawah* [Universitas Udayana].
- Artika, I. W. (2016). Lima Cerpen Propaganda Lekra (1950—1965). *Aksara*, 28(2), 129–142. <http://dx.doi.org/10.29255/aksara.v28i2.126.129-142>
- Bathoro, A. (2018). Redupnya Peran Politik Islam di Masa Demokrasi Terpimpin (Studi Kasus Pembubaran Masyumi oleh Presiden Soekarno). *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 24–41. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/757>
- Bodden, M. (2018). Lekra Woodcuts in the Early 1960s: Socialist Realism, National Culture, and Cosmopolitan Patriots. *Indonesia*, 106(1), 1–33. <https://doi.org/10.1353/ind.2018.0013>
- Firdausi, F. A. (2017). *Njoto: Biografi Pemikiran 1951-1965*. Marjin Kiri.
- Foulcher, K. (1986). *Social Commitment in Literature and the Arts: The Indonesian "Institute of People's Culture" 1950—1965*. Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Foulcher, K. (1987). Politics and literature in independent Indonesia: The view from the left. *Southeast Asian Journal of Social Science*, 83–103. <https://www.jstor.org/stable/24491635>
- Foulcher, K. (2012). Bringing the World Back Home Cultural Traffic in Konfrontasi, 1954-1960. In *Heirs to World Culture* (pp. 29–56). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004253513_003
- Groves, K. W. (1983). *Harian Rakjat, Daily Newspaper of the Communist Party of Indonesia: Its History and Role*. The Australian National University.
- Heinschke, M. (1996). Between Gelanggang and Lekra: Pramoedya's Developing Literary Concepts. *Indonesia*, 61, 145–169. <https://doi.org/10.2307/3351367>
- Hindley, D. (1988). *Social Commitment in Literature and the Arts: The Indonesian "Institute of People's Culture" 1950–1965*. By Keith Foulcher. Clayton, Victoria, Australia: Monash University, Centre of Southeast Asian Studies, 1986. vi, 234 pp. \$8.00. *The Journal of Asian Studies*, 47(2), <https://doi.org/10.2307/2056243>
- Jabrohim, E. (2001). *Metodologi Penelitian Sastra*. Jakarta: Hanindita.
- Mortimer, R. (2006). *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology And Politics, 1959-1965*. Equinox Publishing.
- Namikakanda. (2008). Kebangunan di Kota Bengawan. In R. D. A. Yuliantri & M. M. Dahlan (Eds.), *Laporan dari Bawah, Sekumpulan Cerita Pendek Lekra Harian Rakjat 1950—1965*. Merakesumba.
- Nimat, M. (2009). *Gerakan Perempuan di Indonesia 1950—1965: Studi Kasus Gerwani*. [Universitas Sanata Dharma]. <https://repository.usd.ac.id/27430/>

- Niwandhono, P. (2021). *The Making of Modern Indonesian Intellectuals: The Indonesian Socialist Party (PSI) and Democratic Socialist Ideas, 1930s to mid-1970s*. <https://hdl.handle.net/2123/27770>
- Novitasari, S. A. W., & Utama, M. P. (2020). Dari Realitet Nasi ke Realisme Sosialis: Tema Kerakyatan dalam Seni Rupa Modern Indonesia Masa Persatuan Ahli Gambar Indonesia dan Lembaga Seni Rupa Lembaga Kebudayaan Rakyat. *Historiografi*, 1(1), 71–80. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/historiografi/article/view/27887>
- Oka, P. (2008). Loper. In R. D. A. Yuliantri & M. M. Dahlan (Eds.), *Laporan dari Bawah, Sekumpulan Cerita Pendek Lekra Harian Rakjat 1950—1965*. Merakesumba.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. (2014). *Lekra dan Geger 1965*. PT Gramedia.
- Rakhmanto, B. (2018). Harian Rakjat “Mengangkat” Suara Dari Bawah: Rubrik Asmu Menjawab Dalam Memberitakan Suara Petani Terkait Kasus Landreform 1961-1965. *IHiS (Indonesian Historical Studies)*, 2(1), 46–60. <https://doi.org/10.14710/ihis.v2i1.3201>
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Pustaka Pelajar.
- Retno, L. S. (2008). Paman. In R. D. A. Yuliantri & M. M. Dahlan (Eds.), *Laporan dari Bawah: Sekumpulan Cerita Pendek Lekra: Harian Rakjat, 1950—1965*. Merakesumba.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia Since C. 1200*. Stanford University Press.
- Rizky, P. (2018). *Surat Kabar Harian Rakjat sebagai Sarana Kampanye Politik Partai Komunis Indonesia Tahun 1951-1955* [Universitas Sebelas Maret]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/62380/Surat-Kabar-Harian-Rakjat-sebagai-Sarana-Kampanye-Politik-Partai-Komunis-Indonesia-Tahun-1951-1955>
- Rosidi, A. (2015). *Lekra Bagian dari PKI*. Dunia Pustaka Jaya.
- Rusdi. (1997). *Partai Sosialis Indonesia dan Peranan Kepolitikannya 1948-1960*. Universitas Indonesia.
- Saibun. (2008). Gambar Pemimpin. In R. D. A. Yuliantri & M. M. Dahlan (Eds.), *Laporan dari Bawah, Sekumpulan Cerita Pendek Lekra Harian Rakjat 1950—1965*. Merakesumba.
- Setiadi, D., Priyatna, A., & Rahayu, L. M. (2023). The Portrayal of Women in the Works of Sugiarti Siswadi as the Manifestation of Lekra and Gerwani Ideology. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 31(2), 527–543. <https://doi.org/10.47836/pjssh.31.2.04>.
- Siregar, I. F. (2011). Dinamika Demokrasi di Indonesia Masa Orde Lama: Studi Kasus antara Sukarno Versus Masyumi. *Paramita: Historical Studies Journal*, 21(1), 25–36. <https://doi.org/10.15294/paramita.v21i1.1026>.
- Soekarno. (1965). Subur, Subur, Suburlah PKI. In *Jajasan Pembaruan*.
- Susanto, D. (2018). *Lekra, Lesbumi, Manifes Kebudayaan: sejarah sastra Indonesia periode 1950—1965*. CAPS (Centre for Academic Publishing Service).

- Susilawati, E., Rahayu, I., Salsabila, A. H., & Bahtiar, A. (2022). Realisme Sosial dalam Potret Seorang Komunis Karya Sabar Anantaguna. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 15(1), 122–131. <https://doi.org/10.30651/st.v15i1.8706>
- Teeuw, A. (1991). Social Commitment in Literature and the Arts: The Indonesian 'Institute of People's Culture' 1950–1965. In *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* (pp. 542–544). <https://www.jstor.org/stable/27864291>
- Toer, P. A. (2003). *Realisme-sosialis dan Sastra Indonesia*. Lentera Dipantara.
- Vermeij, E. (2022). *Pemuda Rakyat*. International Institute of Social History. <https://iisg.amsterdam/en/blog/pemuda-rakyat>
- Wellek, R., & Warren, A. (1956). *Theory of Literature*. Harcourt, Brace & World.
- White, B. (2016). Remembering the Indonesian Peasants' Front and Plantation Workers' Union (1945–1966). *The Journal of Peasant Studies*, 43(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/03066150.2015.1101069>
- Widariyanti, C. (2022). Eksistensi Lekra dalam Pusaran Manifesto Kebudayaan Demokrasi Terpimpin. *ISTORIA Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 18(1), 1–17. <http://doi.org/10.21831/istoria.v16i1.31408>
- Wieringa, S. (2003). The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism. *Journal of Women's History*, 15(1), 70–91. <http://doi.org/10.1353/jowh.2003.0039>
- Wulandari, I. (2016). *Konflik Pelaksanaan Land Reform Tahun 1960-1965 Pada Kumpulan Cerpen Laporan Dari Bawah "Sehimpunan Cerita Pendek Lekra Harian Rakjat 1950–1965"* [Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/102438/>
- Yuliantri, R. D. A. (2021). Jajasan "Pembaruan": Propaganda discourse through its printed products. *Informasi*, 51(1), 27–44. <http://doi.org/10.21831/informasi.v51i1.32778.27-44>
- Yuliantri, R. D. A., Dahlan, M. M., & Rakyat, L. K. (2008). *Laporan dari bawah: sehimpunan cerita pendek Lekra : Harian Rakjat, 1950–1965*. Merakesumba.
- Zulfikar, M. F., Saryono, D., & Syahri, M. (2021). Bentuk Resistensi Terbuka Kaum Tani dan Buruh dalam Cerpen-Cerpen Sastrawan Lekra di Koran Harian Rakjat. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 6(9), 1384–1399. <http://dx.doi.org/10.17977/jptpp.v6i9.14984>